

PERAN ASURANSI KESEHATAN BERUPA BPJS BAGI EKONOMI MASYARAKAT DI JAWA BARAT

Ghina Nurrohmah¹, Opi Yanti², Melda Septiani³, Alya Meilani⁴, Kamilatun Nuraidah⁵,
Muhamad Syahwildan⁶

Program Studi Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Alamat
Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

¹ghnanurrohmah02@gmail.com, ²opiiyantii01@gmail.com, ³Meldaseptiani100@gmail.com

⁴alyameilanny.12@gmail.com, ⁵kamilatun97@gmail.com,

⁶muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Menuju akhir tahun 2024, aturan terbaru untuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) menyebar di masyarakat. Karena ada beberapa perubahan pada jaminan yang dapat menyebabkan perubahan dan dinamika dalam layanan kesehatan yang didorong oleh BPJS. Perubahan kecil ini berlaku untuk program JKN, tetapi tentu saja perubahan ini akan berdampak pada industri asuransi sebagai penyedia layanan kesehatan swasta. Perubahan kebijakan BPJS Kesehatan pada akhir 2024 menimbulkan dinamika dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Sebagai penyedia layanan kesehatan utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia, perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran BPJS Kesehatan, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat dengan menganalisis kontribusi BPJS Kesehatan dalam menurunkan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga. Mengkaji bagaimana peran BPJS Kesehatan, melalui program JKN, memengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat, baik dalam bentuk pengurangan beban biaya kesehatan, peningkatan produktivitas kerja, maupun pengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan keluarga. Metode yang digunakan berupa studi literatur dan analisis kebijakan BPJS. Riset dilakukan guna mendapatkan laporan tentang kontribusi BPJS Kesehatan dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat dan dampak BPJS terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga peserta.

Kata Kunci: Asuransi; BPJS kesehatan; Ekonomi; JKN; Masyarakat

Abstract

Towards the end of 2024, the latest rules for BPJS Kesehatan as the organizer of the National Health Insurance Program (JKN) are spreading in the community. Because there are several changes to the guarantees that can cause changes and dynamics in health services driven by BPJS. This small change applies to the JKN program, but of course this change will have an

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: July 2025

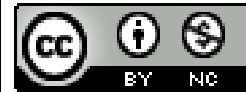
Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

impact on the insurance industry as a provider of private health services. Changes in BPJS Kesehatan policies at the end of 2024 have created dynamics in the national health insurance system. As the main provider of health services for the majority of Indonesians, this change not only has an impact on the health sector, but also has economic consequences, especially for low-income households and small business actors. This study aims to examine how the role of BPJS Kesehatan, through the National Health Insurance (JKN) program, affects the economic resilience of the community by analyzing the contribution of BPJS Kesehatan in reducing the burden of household health expenditures. Examining how the role of BPJS Kesehatan, through the JKN program, affects the economic resilience of the community, both in the form of reducing the burden of health costs, increasing work productivity, and influencing purchasing power and family welfare. The methods used are literature studies and BPJS policy analysis. The research was conducted to obtain a report on the contribution of BPJS Kesehatan in reducing the economic burden on the community and the impact of BPJS on improving the welfare of participant families.

Keywords: Insurance; BPJS Kesehatan; Economy; JKN; Community

PENDAHULUAN

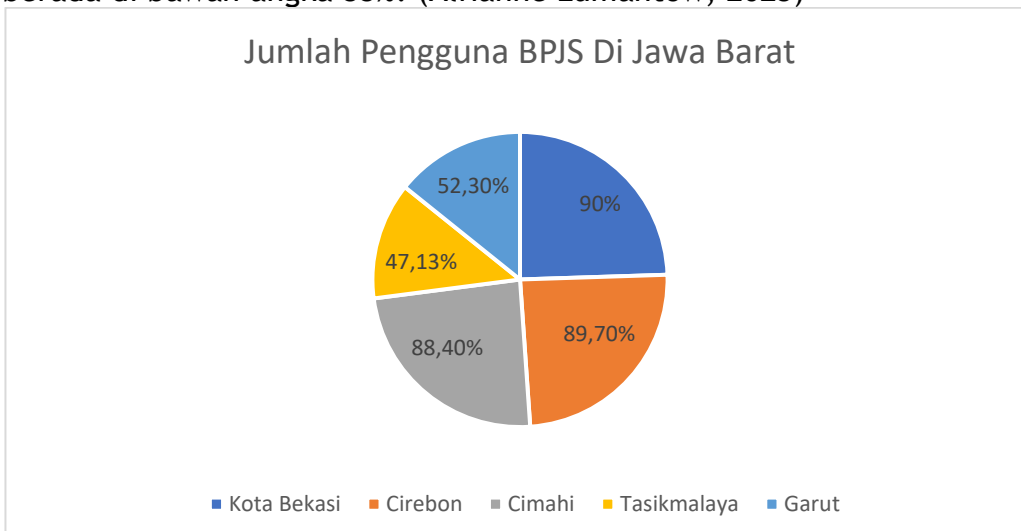
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Sebagai hak dasar warga negara, jaminan atas pelayanan kesehatan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia menyadari bahwa kesehatan memiliki peran penting sebagai modal utama dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Widiastuti, 2017). Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan masyarakat yang sehat, produktivitas kerja meningkat, kualitas hidup membaik, dan ketahanan sosial ekonomi akan lebih kuat. Dalam konteks ini, reformasi dan penguatan sistem kesehatan nasional, termasuk melalui program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa kini dan masa depan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah memiliki empat peran utama yang harus dijalankan, yakni: (1) peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (fungsi pelayanan publik), (2) peran dalam pembangunan (fungsi pembangunan), (3) peran dalam pemberdayaan masyarakat (fungsi perlindungan), serta (4) peran dalam pengaturan (fungsi regulasi). Keempat fungsi ini sebenarnya tidak memiliki urutan prioritas tertentu, sehingga tidak semuanya harus dijalankan secara bersamaan. Namun demikian, fungsi pelayanan publik dianggap sangat penting karena mencerminkan bagaimana pemerintah menjalankan perannya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, yang merupakan inti dari pelayanan publik itu sendiri (Solechan, 2019).

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kemiskinan. Hal ini dapat dipahami karena kondisi kesehatan yang buruk berdampak langsung pada menurunnya tingkat produktivitas kerja. Ketika produktivitas rendah, secara otomatis pendapatan juga menurun (Suiraoaka, 2012) Pendapatan yang rendah berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan. Dalam kondisi miskin, individu atau keluarga cenderung kesulitan mengakses pendidikan yang layak dan tidak mampu membiayai kebutuhan perawatan serta pemeliharaan kesehatan. Dengan demikian, kesehatan memiliki peran utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya kesehatan menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik, khususnya oleh pemerintah sebagai penyelenggara layanan dasar bagi masyarakat.(Arifin et al., 2024). Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi pengguna BPJS yaitu berdasarkan kepercayaan, pengetahuan, sosialisasi, dan pembiayaan masyarakat. Kepercayaan disini maksudnya kepercayaan terhadap pengelola JKN kesehatan tersebut (Utama & Pratiwi, 2023). Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat perlu untuk diperhatikan karena mencerminkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan tersebut. Pemahaman mengenai tingkat kepuasan pasien sangat berguna bagi pihak terkait untuk mengevaluasi program yang sedang berlangsung serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Khotimah, 2023).

Di Provinsi Jawa Barat, kehadiran BPJS Kesehatan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program ini menjadi solusi nyata dalam membantu masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau. Melalui BPJS, masyarakat dapat berobat tanpa harus terbebani oleh tingginya biaya pengobatan, sehingga kondisi kesehatan dapat lebih terjaga dan tertangani dengan baik. (Nugraha et al., 2023)

Menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat tahun 2025, sebanyak 67,57% penduduk Jawa Barat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 64,03% pada 2023. Peningkatan jumlah peserta BPJS ini terjadi secara merata di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kota Bekasi menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepesertaan mencapai 90%, diikuti oleh Kota Cirebon sebesar 89,70% dan Kota Cimahi dengan 88,4%. Sementara itu, beberapa daerah masih menunjukkan tingkat kepesertaan yang relatif rendah, seperti Kabupaten Tasikmalaya dengan 47,13% dan Kabupaten Garut sebesar 52,3%, yang masih berada di bawah angka 55%. (Alfianne Lumantow, 2025)



Sumber: Susenas & BPS Jawa Barat, 2024 (diolah)

Melihat data yang diperoleh, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Jawa Barat sudah sangat peduli terhadap kesehatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pengguna BPJS dari tahun ke tahun. BPJS kesehatan jugsan akan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, masyarakat dapat menangani penyakit lebih cepat dan mencegah komplikasi kesehatan yang lebih serius. Sehatnya tenaga kerja secara tidak langsung mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi, baik dalam sektor formal maupun informal. Selain itu BPJS kesehatan juga membantu masyarakat mengurangi pengeluaran pribadi untuk layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap beban biaya medis. (Bahri et al., 2022)

Untuk mengkaji peran BPJS Kesehatan dalam menunjang ekonomi masyarakat di Jawa Barat, diperlukan pendekatan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Pendekatan ini dilakukan dengan menggambarkan kondisi objektif kepesertaan dan pemanfaatan BPJS Kesehatan di Jawa Barat. Data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Kesehatan akan digunakan untuk memetakan bagaimana hasil tingkat kepesertaan BPJS per kabupaten atau kota. (BPJS Kesehatan, 2023) Selanjutnya akan dilakukan pendekatan analisis ekonomi mikro untuk memahami dampak langsung keikutsertaan BPJS terhadap beban pengeluaran rumah tangga seperti perbandingan pengeluaran kesehatan sebelum dan sesudah menjadi peserta BPJS dan dampak keikutsertaan BPJS terhadap alokasi pendapatan keluarga (misalnya, apakah penghematan biaya kesehatan dialihkan ke kebutuhan lain seperti pendidikan atau modal usaha). Yang terakhir dilakukan pendekatan sosiologis untuk memahami persepsi dan perilaku masyarakat terhadap BPJS Kesehatan seperti tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan dan hambatan sosial dan budaya dalam keikutsertaan program (terutama di daerah dengan tingkat kepesertaan rendah). (Samodra & Wirantari, 2024) Dengan dilakukannya pemecahan masalah berupa kombinasi pendekatan deskriptif, ekonomi, dan sosial penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana BPJS Kesehatan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan sebagai pilar kesejahteraan masyarakat.

Studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nirwan Maulana, Prastuti Soewondo, Nadhila Adani, Paulina Limasalle, Anooj Pattnaik pada tahun 2022 (Maulana et al., 2022), menyatakan bahwa JKN berhasil menurunkan beban pengeluaran langsung (out-of-pocket expenditure) masyarakat miskin untuk layanan kesehatan. OOP yaitu pengeluaran langsung dari kantong pribadi yang dikeluarkan oleh individu atau rumah tangga untuk membayar layanan kesehatan, tanpa bantuan dari asuransi atau subsidi pemerintah. Namun, sebagian besar studi tersebut lebih berfokus pada level nasional atau provinsi dengan cakupan umum. Sementara itu, kajian spesifik yang menggali hubungan antara kepesertaan BPJS dan ketahanan ekonomi masyarakat secara terperinci di tingkat provinsi, seperti Jawa Barat, masih relatif terbatas. Padahal, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan menunjukkan dinamika sosial ekonomi yang kompleks, dengan kesenjangan antara kota besar dan wilayah perdesaan.

Pendekatan baru yang akan dilakukan dalam riset ini adalah dengan mengkaji dampak langsung BPJS terhadap variabel ekonomi rumah tangga, seperti produktivitas kerja, pengeluaran kesehatan, dan alokasi pendapatan keluarga. Pendekatan ini menjadi relevan karena tidak hanya menilai keberhasilan program dari segi cakupan kepesertaan, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nyata. (Sari et al., 2024)

Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program jaminan sosial kesehatan yang bersifat nasional. Mengacu pada peraturan dalam UU No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS, program yang dijalankan BPJS Kesehatan ditujukan agar semua warga negara Indonesia memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan memiliki peran penting dari sisi hukum bisnis dan sosial sebagai lembaga yang mengelola dana publik yang besar. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS Kesehatan berhadapan dengan sejumlah masalah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana, penyediaan layanan kesehatan, serta kerja sama dengan rumah sakit, klinik, dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Semua aktivitas ini harus dilakukan dengan mematuhi standar tata kelola yang baik, yang menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Di samping itu, BPJS Kesehatan juga wajib mengikuti berbagai peraturan yang mengatur sektor kesehatan di Indonesia, yang mengharuskan adanya integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam dunia hukum bisnis, BPJS Kesehatan memegang peranan penting tidak hanya dalam memberikan jaminan kesehatan, tetapi juga dalam membangun hubungan yang baik dengan penyedia layanan kesehatan, seperti klinik dan rumah sakit. Hubungan ini perlu diatur oleh peraturan yang ada yang mengawasi tanggung jawab dan keterikatan antara BPJS Kesehatan dan penyedia layanan kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan wajib memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, mengikuti prinsip-prinsip good governance, agar dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi BPJS Kesehatan dalam sistem jaminan sosial melalui sudut pandang hukum bisnis. Tulisan ini membahas regulasi hukum yang mengatur BPJS Kesehatan, tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan program asuransi kesehatan, serta dampaknya terhadap industri kesehatan di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fungsi BPJS Kesehatan dalam konteks hukum bisnis dan bagaimana hal itu membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Doko, Kenjam, dan Ndoen (2019), terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan pemanfaatan kartu JKN di wilayah kerja Puskesmas Manutapen. Pengetahuan tentang JKN dapat mempengaruhi bagaimana orang yang terlibat dalam program JKN menggunakan layanan kesehatan yang ditawarkan (Amalina, Respati, & Budiman, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang terstruktur mengenai pengaruh keanggotaan BPJS Kesehatan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Jawa Barat. Survei primer tidak dilakukan dalam penelitian ini, melainkan memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia untuk umum dan diakui secara ilmiah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyediakan informasi melalui publikasi Jawa Barat dalam Angka dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), laporan tahunan serta dokumen resmi dari BPJS Kesehatan, dan juga publikasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu pada jurnal ilmiah dan penelitian sebelumnya yang berkaitan untuk memperkuat analisa yang dilakukan.

Analisis dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, menghitung persentase perubahan kepesertaan BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun, serta mengamati pola hubungan antara cakupan kepesertaan JKN dan indikator ekonomi masyarakat, seperti penurunan pengeluaran kesehatan mandiri (out-of-pocket expenditure). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak nyata program JKN terhadap pengurangan beban ekonomi, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan peningkatan yang baik selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke 2024, sebagaimana ditampilkan pada Tabel I berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Barat			
No	Kabupaten\ Kota	Kepesertaan 2023 (%)	Kepesertaan 2024 (%)
1	Kota Bekasi	88,10	90,00
2	Kota Cirebon	87,50	89,70
3	Kota Cimahi	86,20	88,40
4	Kabupaten Bandung	60,00	63,40
5	Kabupaten Garut	49,20	52,30
6	Kabupaten Tasikmalaya	44,10	47,13
	Rata-rata Provinsi	64,03	67,57

Sumber: BPS Jawa Barat, 2025(diolah)

Meskipun terdapat peningkatan rata-rata provinsi sebesar 3,54%, data pada tabel menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antar daerah. Kota Bekasi memiliki cakupan layanan kesehatan universal lebih dari 90%, sementara Kabupaten Tasikmalaya dan Garut masih di bawah 55%.

Pengeluaran rumah tangga sangat terpengaruh oleh peningkatan keanggotaan BPJS. Rata-rata pengeluaran kesehatan bulanan rumah tangga sebelum dan sesudah menjadi peserta BPJS mengalami penurunan yang cukup signifikan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Tabel 2. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Kesehatan Rumah Tangga di Jawa Barat			
Kategori Rumah Tangga	Sebelum BPJS (Rp/Bln)	Sesudah BPJS (Rp/Bln)	Penghematan (%)
Kelompok Berpenghasilan Rendah	320.000	262.000	18,13%
Kelompok Menengah	410.000	355.000	13,41%

Sumber: Susenas & BPS Jawa Barat,2024 (diolah)

Penghematan ini menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk mengurangi biaya pengobatan. Selain itu, pengeluaran dialihkan untuk pendidikan anak dan konsumsi bergizi, yang berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang.

Selain pendapatan yang diperoleh dari penghematan, usia juga berperan dalam penggunaan BPJS Kesehatan. Menurut Teori Penggunaan Layanan Kesehatan, usia menjadi salah satu faktor internal yang memengaruhi cara seseorang mengakses layanan kesehatan. Seiring bertambahnya usia, kekuatan sistem kekebalan tubuh seringkali berkurang, dan pada orang yang lebih tua, penyakit cenderung lebih parah. Oleh karena itu, orang yang telah berusia lanjut biasanya lebih memerlukan perawatan medis untuk penyembuhan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berumur lebih dari 46 tahun cenderung lebih sering menggunakan layanan kesehatan dibandingkan dengan yang lebih muda (Harahap et al. , 2024).

Dengan adanya banyak faktor yang mempengaruhi, produktivitas kerja peserta BPJS juga mengalami peningkatan. Ini berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pekerja yang bisa mengakses layanan kesehatan memiliki tingkat kehadiran 12% lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Namun, efek positif ini tidak terdistribusi secara merata di setiap daerah. Di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah, seperti Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, masih terdapat hambatan budaya dan informasi. Beberapa orang menolak untuk mendaftar karena mereka percaya bahwa layanan BPJS lambat atau tidak ada bedanya dengan layanan gratis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis dan edukasi masyarakat sangat penting untuk mengimplementasikan program JKN. (dr. Siswanto, 2020)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program JKN berhasil mengurangi pengeluaran langsung untuk layanan kesehatan. Namun, dengan menyediakan data spesifik mengenai dampak ekonomi rumah tangga dan dampak regional, metodologi penelitian ini memperkuat kontribusi teoritis.

Oleh karena itu, terbukti bahwa keterlibatan dalam BPJS Kesehatan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan produktivitas kerja. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke layanan tersebut di seluruh kabupaten atau kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

BPJS Kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dengan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau, BPJS membantu meringankan beban biaya pengobatan bagi masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar saat sakit, sehingga pendapatan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain Serta Menurunkan angka kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi (catastrophic spending).

Akses pengobatan yang lebih mudah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas kerja. BPJS memperluas akses ke layanan kesehatan hingga ke pelosok desa, mendorong keadilan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah Jawa Barat. Sistem jaminan sosial kesehatan membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sehingga mengurangi kecemasan finansial akibat risiko kesehatan. BPJS menjadi instrumen penting bagi pekerja sektor informal untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, yang sebelumnya sulit dijangkau asuransi swasta

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianne Lumantow. (2025, May 13). *Persentase Penduduk di Jawa Barat yang Punya Jaminan Kesehatan Tahun 2023 dan 2024*.
- Arifin, S., Pd, M., Fauzie Rahman, S. K. M., & Anggun Wulandari, S. K. M. (2024). *Sumber Pendanaan Kesehatan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bahri, S., Amri, A., & Siregar, A. A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Aplikasi Mobile Jkn Bpjs Kesehatan Menggunakan Metode Service Quality (Servqual). *Industrial Engineering Journal*, 11(2).
- dr. Siswanto, M. D. Dr. dr. H. H. M. K. N. K. M. Sc. , P. H. , Dr. P. H. Prof. Dr. dr. L. H. M. M. (2020). *Buku Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia*. <https://Repository.Badankebijakan.Kemkes.Go.Id/Id/Eprint/4143/1/Buku%20Kinerja%20Pembangunan%20Kesehatan%20di%20Indonesia.Pdf>.
- Harahap, A. N. S., Kusuma, N. T. A., & Gurning, F. P. (2024). ANALISIS PEMANFAATAN PELAYANAN BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI INDONESIA: LITERATURE REVIEW. *Jurnal Kesehatan Dan Teknologi Medis (JKTM)*, 6(3).
- Khotimah, K. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 231-245.
- Maulana, N., Soewondo, P., Adani, N., Limasalle, P., & Pattnaik, A. (2022). How Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) coverage influences out-of-pocket (OOP) payments by vulnerable populations in Indonesia. *PLOS Global Public Health*, 2(7), e0000203. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000203>
- Samodra, N., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dalam Penerapan Program Pelayanan Publik BPJS Kesehatan. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(4), 147-151.
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696.
- Suiraoka, I. P. (2012). Penyakit degeneratif. *Yogyakarta: Nuha Medika*, 45(51).
- Utama, H. H. U., & Pratiwi, E. P. (2023). Pengaruh Stigma Terhadap Minat Penggunaan Layanan BPJS Kesehatan. *Journal of Economics, Management, Business, and Entrepreneurship*, 1(2), 81-89.
- Widiastuti, I. (2017). Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 91-101.
- Nugraha F, Ritchi H, Adrianto Z *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* (2023) 11(2) 224-238
- Interaksi Big Data, Kualitas Data, dan Kinerja Keputusan: Studi Kasus BPJS Kesehatan
- BPJS Kesehatan, Laporan Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2023, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/>
- Sari, Novi Dianita, et al. "Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3.2 (2024): 14-25.